

SMART CITY JEMBER: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN TANTANGAN KESENJANGAN AKSES

Rika Asti Aulina¹, Hamdi HS²

rikaulina04@gmail.com¹, hamdi.hs@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Smart City di Kabupaten Jember, dengan fokus pada peran digitalisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam konteks digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Jember Elektronik Layanan Masyarakat (SI-JELAS) telah berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemangku kepentingan dan pengembangan kebijakan yang mendukung transformasi digital guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Temuan ini tidak hanya relevan bagi Kabupaten Jember tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan di era digital.

Kata Kunci: Smart City, Digitalisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Kabupaten Jember.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang berbasis kolaborasi di era digital sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas layanan publik. Dalam hal ini, digitalisasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih baik, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas. Konsep kolaboratif governance menuntut adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Ini menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama secara efektif.

Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan cara penyajiannya. Informasi yang kompleks harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi tersebut, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. (Adaliya, 2024). Sebagai contoh, setiap desa harus mempublikasikan laporan keuangan dan keputusan penting melalui portal online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk memungkinkan publik mengawasi dan memahami penggunaan anggaran serta kebijakan yang diterapkan, sehingga menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. (Pemerintah Desa Godog, 2023).

Selain itu, penyajian informasi secara terbuka akan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan yang sedang dirumuskan, serta memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih inklusif

dan partisipatif, di mana suara masyarakat diakui dan diperhitungkan dalam setiap langkah kebijakan. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024).

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi. Pertama, kesenjangan digital dapat menghambat partisipasi masyarakat, terutama di daerah terpencil yang kurang akses terhadap teknologi informasi. Kedua, masalah keamanan data menjadi perhatian utama, karena meningkatnya jumlah data yang dikelola secara digital dapat menimbulkan risiko kebocoran informasi. Ketiga, perubahan paradigma dalam birokrasi memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk beradaptasi dengan pendekatan baru ini.

Menteri Johnny juga mengidentifikasi empat tantangan utama bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi era kepemimpinan digital saat ini. Tantangan tersebut mencakup dorongan untuk mengimplementasikan transformasi digital sebagai bagian dari perubahan gaya hidup baru, penyediaan tata kelola e-government dan bisnis digital yang efektif, pengembangan kebijakan atau legislasi yang mendukung transformasi digital, serta peningkatan kinerja melalui persiapan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang digital (Kominfo Kota Tasikmalaya, 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan para pemimpin Indonesia agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam era transformasi digital ini.

Kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terkait penggunaan metode kualitatif dalam konteks ini sangat krusial. Metode kualitatif memiliki potensi untuk memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan persepsi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses kolaboratif. Penelitian ini dapat menggali bagaimana teknologi digital mempengaruhi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kolaborasi tersebut. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi implementasi Smart City yang lebih efektif, baik di Kabupaten Jember maupun di daerah lainnya. Dengan demikian, penting untuk menekankan perlunya pendekatan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dinamika ini secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review) untuk mengevaluasi implementasi Smart City di Indonesia, mengidentifikasi tantangan teknologi, dan menilai aspek keberlanjutan yang terkait. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang menyeluruh dari berbagai sumber yang relevan. (Mahayani, 2024, 108) Sumber data utama mencakup artikel jurnal ilmiah yang membahas inovasi teknologi dan praktik Smart City, laporan penelitian dari institusi akademik, dokumen resmi pemerintah yang berisi kebijakan, regulasi, dan laporan perkembangan proyek Smart City, serta sumber media massa yang menawarkan perspektif terkini dan studi kasus nyata mengenai penerapan Smart City di berbagai kota di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi Smart City di tanah air.

Proses penelitian kualitatif dalam konteks ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam implementasi Smart City. Dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik-praktik yang terjadi di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang

lebih baik tentang bagaimana digitalisasi mempengaruhi tata kelola pemerintahan dan interaksi masyarakat dengan layanan publik.

2. Dokumentasi: Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi, laporan kebijakan, serta data statistik yang relevan. Hal ini membantu peneliti memahami konteks kebijakan dan perkembangan program Smart City di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Digitalisasi

Digitalisasi memainkan peran yang sangat krusial dalam transformasi pelayanan publik di Kabupaten Jember. Digitalisasi memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengubah sistem pelayanan yang sebelumnya manual menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui implementasi Sistem Informasi Jember Elektronik Layanan Masyarakat (SI-JELAS), digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, seperti pengurusan surat-menyurat dan tanda tangan elektronik, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi informasi, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mengurangi keluhan terkait keterlambatan dan kompleksitas dalam proses pelayanan. (Najib, 2024)

Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi pada pengurangan praktik pungutan liar yang sebelumnya marak terjadi dalam pelayanan publik. Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, masyarakat dapat lebih mudah memantau proses administrasi dan melaporkan penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, peran digitalisasi dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada peningkatan efisiensi, tetapi juga menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, digitalisasi melalui SI-JELAS menjadi alat inovatif yang mendukung perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan

Kolaborasi multi-pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Smart Village, seperti yang diuraikan oleh (Rohman et al., 2024). Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peran kolaborasi ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Melalui kolaborasi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini penting untuk keberlanjutan dan efektivitas program.

2. Pengembangan Regulasi dan Kebijakan

Dalam konteks pengembangan Smart Village, kolaborasi ini memungkinkan penyusunan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif. Regulasi yang baik akan menjadi acuan bagi pengembangan infrastruktur dan layanan yang terintegrasi, serta memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.

Secara keseluruhan, kolaborasi multi-pemangku kepentingan merupakan kunci untuk keberhasilan implementasi Smart Village di Kabupaten Jember. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program-program dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat desa. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Hubungan dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kolaborasi Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi sangat relevan dalam konteks implementasi Smart City di Kabupaten Jember:

1. Akuntabilitas: Digitalisasi meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui transparansi dalam pelayanan publik. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengawasi proses pelayanan dan memberikan umpan balik langsung kepada pemerintah.
2. Transparansi: Aplikasi SI-JELAS memungkinkan masyarakat untuk melihat status pengajuan layanan mereka secara real-time. Ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan di mana masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pelayanan diberikan.
3. Partisipasi: Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terlihat jelas dalam pengembangan aplikasi pelayanan publik. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perancangan aplikasi untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Ini menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
4. Efisiensi: Implementasi teknologi digital telah meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif melalui sistem online.

Implikasi Penelitian

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan publik di Kabupaten Jember. Pertama, perlu adanya peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung aksesibilitas digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan dengan optimal.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta harus terus diperkuat untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan publik. Dengan membangun kemitraan strategis, Kabupaten Jember dapat lebih cepat mencapai tujuan Smart City yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Smart City di Kabupaten Jember tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan kolaboratif yang kuat, Kabupaten Jember dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Digitalisasi memainkan peran vital dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, mengungkapkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Melalui penerapan Sistem Informasi Jember Elektronik Layanan Masyarakat (SI-JELAS), pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat.

Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun

terdapat tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah keamanan data, penerapan konsep Smart City diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana digitalisasi dapat meng transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang tertera di atas, maka disarankan hal hal berikut:

1. Peningkatan Akses Teknologi: Mengingat adanya kesenjangan digital yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, sangat penting bagi pemerintah untuk memperluas akses teknologi informasi, terutama di daerah terpencil. Program pelatihan dan penyediaan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses digitalisasi.
2. Penguatan Keamanan Data: Dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, perhatian terhadap keamanan data harus ditingkatkan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk melindungi data pribadi masyarakat dan mencegah kebocoran informasi. Pelatihan bagi pegawai pemerintah tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data juga sangat diperlukan.
3. Penelitian Berkelanjutan: Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif sangat penting untuk memahami dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks digitalisasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk implementasi Smart City.
4. Kolaborasi yang Lebih Kuat: Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Forum atau platform diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat dibentuk untuk membahas tantangan dan peluang dalam implementasi Smart City secara bersama-sama.
5. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan penggunaan teknologi digital sangat penting. Program edukasi yang menjelaskan cara menggunakan layanan digital dan manfaatnya harus diperkenalkan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, penting untuk memperkuat transparansi dalam laporan keuangan dan kegiatan pemerintahan. Portal online yang memungkinkan akses publik terhadap informasi ini harus dikembangkan dan dipromosikan secara luas agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan yang diterapkan.
7. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program Smart City akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Proses evaluasi ini harus melibatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa program tetap relevan dengan kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaliya, S. (2024, Juli 02). Transformasi Tata Kelola Pemerintahan di Era Digital. Ampar.id. <https://ampar.id/transformasi-tata-kelola-pemerintahan-di-era-digital/>
- Annisa. (2023, November 21). Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya. Fakultas Hukum - UMSU. Retrieved November 27, 2024, from <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>

- Darmanerus DUarmas. (2016, April 14). PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KORMOMOLIN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT, 1.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/11741>
- Dinas Lingkungan Hidup. (2017, Mei 22). PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. DLH Buleleng.
<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Ipan Nurhidayat. (2013, Februari 1). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1, 40-52.
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/4.+Ipan.pdf>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, November 21). Beranda Tentang Kami Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan Publik Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital: Tantangan dan Peluang. setneg.go.id.
https://www.setneg.go.id/baca/index/transformasi_komunikasi_publik_di_era_digital_tantangan_dan_peluang
- Kominfo Kota Tasikmalaya. (2021, September 14). Menkominfo: Kolaborasi Kepemimpinan Digital Kunci Transformasi. diskominfo.tasikmalayakota.go.id.
<https://diskominfo.tasikmalayakota.go.id/kementerian/menkominfo-kolaborasi-kepemimpinan-digital-kunci-transformasi/>
- Mahayani, N. M. H. (2024, Juni 4). EVALUASI IMPLEMENTASI SMART CITY DI INDONESIA: TANTANGAN TEKNOLOGI DAN KEBERLANJUTAN. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10, 106-117.
<https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/209>
- Najib, D. M. N. (2024, Juli 2). Komunikasi Inovasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Digital Melalui Sistem Informasi Jember Elektronik Layanan Masyarakat (SI-JELAS) Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember. *Digital Library UIN KHAS Jember*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/34939>
- Pemerintah Desa Godog. (2023, Agustus 28). Transparansi dan Akuntabilitas – Desa Contoh | Kab. Contoh. [Panda.id](http://panda.id). Retrieved November 27, 2024, from <https://demo.panda.id/desa-anti-korupsi/transparansi-dan-akuntabilitas/>
- Rohman, H., Suryawati, D., Anwar, & Suharsono, A. (2024, Mei-Juli). ANALISA KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SMART VILLAGE. *Journal Publicuho*, 7, 964-972. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455>
- Universitas Medan Area Fakultas Isipol Prodi Ilmu Pemerintahan. (2023, Desember 20). Konsep dan Prinsip Good Governance. pemerintahan.uma.ac.id.
<https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-prinsip-good-governance/>
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. (2022, Juni). STRATEGI IMPLEMENTASI SMART CITY KOTA BANDUNG. *Jurnal Good Governance*, 18, 87-98. 10.32834/gg.v18i1.460